

PERBANDINGAN PENDIDIKAN: SISTEM PENDIDIKAN DI INONESIA DAN SINGAPURA

Ika Kurniati Sofiani¹, Shinta Maya Sari², Fitri Oktofia³, Tanti Elmiah⁴, Seri Astuti¹

ikur.wafie@gmail.com, mayasarshinta@gmail.com, fitrioktofia333@gmail.com,
tantielmiah44@gmail.com, seriastuti40@gmail.com

Abstrak

Artikel ini membahas tentang program-program reformasi pendidikan di dua Negara dengan latar belakang dan kondisi serta ideologi yang berbeda yaitu Singapura dan Indonesia. Diantara program reformasi pendidikan di Singapura adalah Teach less, Learn More; Thinking School, Learning Nation, dan School Excellent Model. Sedangkan kebijakan reformasi pendidikan di Indonesia diantaranya diselenggarakan dengan desentralisasi pendidikan dalam kerangka manajemen berbasis sekolah, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dan Kurikulum 2013, serta program sertifikasi guru. Dari hasil pembahasan, dapat diketahui bahwa Singapura telah berhasil menyelenggarakan reformasi pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari kualitas pendidikan Singapura yang masuk dalam ranking teratas Negara-negara dengan pencapaian standar pendidikan internasional. Sementara itu, Indonesia nampak masih harus berjuang untuk mencapai tujuan reformasi pendidikan. Hasil implementasi pendidikan yang berbeda di kedua Negara ini tentu dikarenakan perbedaan latar belakang, serta kondisi sosial, ekonomi, politik budaya dan geografis kedua Negara tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan penyelenggaraan reformasi pendidikan di sebuah Negara.

Kata Kunci: Sistem Pendidikan, Indonesia, Singapura.

¹ . ^{2,3,4,5} . Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkalis, Indonesia

Abstract

This article discusses on educational reformation programs conducted in two countries which have different background as well as different ideology, social, economic, political, and geographical circumstances i.e., Singapore and Indonesia. Some of the main educational reform agendas in Singapore are Teach less, Learn More; Thinking School, Learning Nation, and School Excellent Model. Meanwhile, educational reform programs in Indonesia are conducted through educational decentralization within the framework of school based management, School-level Curriculum and the 2013Curriculum and teacher certification. It can be understood that Singapore has succeeded in conducting educational reform. This can be seen from the quality of Singaore's education which has been ranked high in achieving he benchmark of international education standard. Meanwhile, Indonesia still needs to struggle to achieve the desired outcomes of educational reforms agendas. The differing result of educational reform revealed in these two countries resulted from different background of the countries. Thus, it can be concluded that there are a number of factors influencing the success of educational refoms agendas in a country.

Keywords: Education System, Indonesia, Singapore.

PENDAHULUAN

Globalisasi dan hadirnya era pengetahuan menuntut adanya perubahan dramatis pada karakter dan fungsi pendidikan. Era yang ditandai dengan perubahan serba cepat dan tidak tentu dan bergesernya definisi modal dari kepemilikan barang menjadi kepemilikan pengetahuan dan intelektual mempengaruhi segenap lini dan aspek kehidupan. Kondisi ini mau tidak mau berpengaruh pada kebijakan pendidikan, proses pembelajaran, dan menuntut adanya reformasi pendidikan.

Struktur sekolah dan materi-materi yang diajarkan menjadi usang dan tidak lagi relevan dengan kondisi ekonomi dan lingkungan serta tantangan zaman yang saat ini berkembang. Untuk meningkatkan keunggulan serta merespon kebutuhan era global bagi terciptanya masyarakat yang kompetitif, reformasi pendidikan yang menyeluruh perlu mendapatkan perhatian dan kebijakan yang serius dari pemerintah. Terkait dengan hal tersebut, beberapa negara di dunia telah menerapkan berbagai bentuk kebijakan di bidang pendidikan yang diharapkan mampu menjawab tantangan pada perkembangan era globalisasi.

Pada bulan Juni 2013, pemerintah pusat di Tiongkok mengeluarkan kebijakan evaluasi hijau yang merupakan panduan untuk seluruh provinsi dalam mereformasi model penilaian mutu pendidikan serta kebijakan pengurangan beban akademik yang mendorong daerah dan sekolah mengurangi beban akademik bagi siswa pendidikan dasar. Di Korea Selatan, pengaruh College Scholastic Aptitude Test (CSAT) yang dianggap “sakral”, mengakibatkan pendidikan di Korea Selatan lebih banyak digerakkan oleh lembaga bimbingan belajar.²

Untuk itu, pemerintah Korea Selatan melakukan beberapa reformasi untuk mengurangi ketergantungan pada tes yaitu dengan mengadakan razia kepada lembaga bimbingan belajar yang masih ada kegiatan belajar di atas jam 22.00 dan mendorong universitas untuk melakukan penerimaan mahasiswa tidak hanya

² Martahi Saoloan Sitompul, ‘Dampak Kerjasama Pendidikan Indonesia Dan Singapura (Studi Kasus: : Sister School SMA Labschool Jakarta Dan Chij St. Joseph’s Convent Singapura 2008-2011)’, *Jom Fisip*, 5.2 (2018), 1–12.

berdasarkan pada nilai CSAT. Sementara itu, karena merasa tertinggal oleh negara-negara Asia Timur dalam berbagai pemetaan pendidikan global, Amerika Serikat mendorong inisiatif kurikulum inti.

Pemerintah federal menggunakan politik anggaran untuk mendorong negara bagian menyesuaikan kurikulum daerah dan tes terstandarnya dengan Common Core. Pada tahun 1998, Polandia melakukan reformasi pendidikan dimulai dengan membuat kurikulum inti yang baru. Polandia juga mengirimkan 25% guru kembali ke LPTK untuk dididik kembali, serta mengubah jalur pendidikan dengan memundurkan penjurusan siswa selama setahun. Guru juga diberi otonomi untuk memilih buku teks sendiri serta mengembangkan atau memilih di antara lebih dari 100 opsi kurikulum spesifik yang sudah disetujui oleh pemerintah pusat.³

Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang didasarkan pada upaya membangun pandangan yang diteliti secara rinci, dibentuk dengan katakata, gambaran holistik dan rumit. Sementara itu, pendekatan yang dipakai adalah pendekatan deskriptif analitik yang dimaksudkan untuk mendapatkan data yang mendalam dan mengandung makna serta menelaah masalah yang ada pada masa kini.

Dengan pendekatan deskriptif analitik, artikel ini mengupas secara komprehensif, obyektif, dan sistematis mengenai implementasi reformasi pendidikan di Singapura dan Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka yaitu metode pengumpulan data dengan melakukan kajian terhadap berbagai literature baik berupa buku, jurnal, catatan, maupun laporan yang berkaitan dengan reformasi pendidikan baik di Singapura maupun di Indonesia

Pengumpulan data dilakukan dengan memilah sumber-sumber referensi dan literature ilmiah yang terkait dengan reformasi pendidikan, latar belakang dan kondisi pendidikan di Singapura dan Indonesia, kebijakankebijakan yang terkait

³ Abdul Wahab Syakrani and others, 'Sistem Pendidikan Di Negara Singapura', *Adiba: Journal of Education*, 2.4 (2022), 517–27 <<http://www.ef.co.id/upa/education-systems/education-system-singapore>>.

dengan reformasi pendidikan di Singapura dan Indonesia serta kondisi setelah diterapkannya kebijakan-kebijakan tersebut, kemudian mengkaji dan menganalisis serta menyajikannya dalam susunan yang sistematis.

PEMBAHASAN

Pengertian Sistem Pendidikan

Istilah sistem berasal dari bahasa Yunani *systema* yang artinya: suatu keseluruhan yang tersusun dari banyak bagian (*whole compounded of several parts*). Di antara bagian-bagian itu terdapat hubungan yang berlang-sung secara teratur. Definisi sistem yang lain dikemukakan Hasbullah sistem adalah jumlah keseluruhan dari bagian-bagiannya yang saling bekerja sama untuk mencapai hasil yang diinginkan berdasarkan kebutuhan yang telah ditentukan. Di dalam sistem itu ada tujuan, proses, dan berbagai unsur atau komponen untuk mewujudkannya.

Dikemukakan oleh Ryans, sistem adalah sejumlah elemen (objek, orang, Aktivitas, rekaman, informasi dan lain-lain) yang saling berkaitan dengan proses dan struktur secara teratur, dan merupakan satu kesatuan organisasi yang berfungsi untuk mewujudkan hasil yang dapat diamati (dapat dikenal wujudnya) sehingga tujuan tercapai.” Sistem adalah suatu kesatuan komponen yang satu sama lain saling berkaitan dan saling berinteraksi untuk mencapai suatu hasil yang diharapkan secara optimal sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Rumusan yang lain dikemukakan oleh Elis M Award yang dikutip oleh Anas Sudjana, ia menambahkan unsur rencana ke dalamnya, sehingga sistem itu dikatakannya merupakan sehimpunan komponen atau sub sistem yang terorganisasikan dan berkaitan sesuai dengan rencana untuk mencapai suatu tujuan.

Dari beberapa pengertian tentang sistem tersebut dapat dirinci unsur-unsur dari suatu sistem yaitu terdiri dari (1) himpunan bagian-bagian, (2) bagian- bagian itu saling berkaitan, (3) masing-masing bekerja secara mandiri dan bersama-sama yang satu sama lain saling mendukung, (4) semuanya ditunjukkan untuk pencapaian tujuan bersama, dan (5) terjadi di dalam sebuah lingkungan yang rumit dan kompleks.

Namun istilah sistem baru memiliki pengertian yang jelas jika dihubungkan dengan istilah lain yang mensifatinya. Seperti sistem pendidikan, sistem politik, sistem ekonomi, dan sistem keamanan. Adapun dalam kajian ini yang dimaksud adalah sistem pendidikan nasional di Indonesia.

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat, bangsa dan Negara.

Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa sistem pendidikan adalah kesatuan komponen-komponen yang terkait dalam penyelenggaraan pendidikan. Semua unsur itu saling terkait dan bersatu untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Secara teori, sistem pendidikan terdiri dari komponen-komponen atau bagian-bagian yang menjadi inti dari proses pendidikan.

Dalam aktivitas pendidikan terdapat enam komponen pendidikan yang dapat membentuk pola interaksi atau saling mempengaruhi namun komponen integrasinya terutama terletak pada pendidik dengan segala kemampuannya dan keterbatasannya. Keenam komponen tersebut meliputi: (1) tujuan, (2) pendidik, (3) murid, (4) isi/materi, (5) metode, dan (6) situasi lingkungan. Noeng Muhajir mengungkapkan bahwa komponen-komponen pendidikan terdiri dari: (1) tujuan, (2) subjek pendidik, (3) pendidik, (4) lingkungan. Dari kedua pendapat tersebut maka komponen-komponen pendidikan terdiri dari (1) tujuan, (2) murid, (3) pendidik, (4) metode, (5) isi, (6) lingkungan.

Sementara menurut pendapat Ahmad Tafsir, komponen yang terlibat dalam pendidikan setidaknya ada sepuluh, yaitu (1) tujuan pendidikan, (2) pendidik, (3) siswa, (4) alat-alat pendidikan, (5) kegiatan. Alat pendidikan dirinci lagi (6) kurikulum atau bahan ajar, (7) metode pengajaran, (8) evaluasi, (9) pembiayaan atau gaji, (10) peralatan berupa benda.⁴

⁴ Pepen Supandi, "Variasi (Format) Sistem Pendidikan di Indonesia", *Jurnal Almufida* Vol. I No. 1 2016 hal 1164-166.

Pendidikan Sebagai Sistem

Dalam Bab ini I Pasal 1 UU SISDIKNAS no. 20 tahun 2003 disebutkan bahwa Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Berangkat dari bunyi pasal ini dapat diketahui bahwa pendidikan adalah sistem yang merupakan suatu totalitas struktur yang terdiri dari komponen yang saling terkait dan secara bersama menuju kepada tercapainya tujuan (Soetarno, 2003: 2). Adapun komponen-komponen dalam pendidikan nasional antara lain adalah lingkungan, sarana-prasarana, sumberdaya, dan masyarakat. Komponen-komponen tersebut bekerja secara bersama-sama, saling terkait dan mendukung dalam mencapai tujuan pendidikan.

Tujuan pendidikan nasional yang dirumuskan dalam UU SISDIKNAS adalah untuk mengembangkan potensi anak didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Di samping komponen-komponen tersebut pendidikan juga meliputi aspek-aspek sistemik lainnya yaitu: ISI PROSES TUJUAN

Implementasi dari aspek pendidikan isi adalah input (anak didik) sebagai obyek dalam pendidikan, sedangkan proses/trasformasi merupakan mesin yang akan mencetak anak didik sesuai yang diharapkan, dan Tujuan merupakan hasil akhir yang dicapai atau output. Perlu diketahui bahwa proses/ trasformasi dalam kerjanya dipengaruhi oleh berbagai factor, seperti fasilitas, waktu, lingkungan, sumber daya, pendidik dan sebagainya, dimana faktor tersebut sangat menentukan output.

Oleh karena itu sebuah sistem pendidikan perlu melakukan penyesuaian dengan lingkungan, karena lingkungan mengandung sejumlah kendala bagi bekerjanya sistem (misalnya: keterbatasan sumber daya). Untuk itu sistem pendidikan dituntut oleh lingkungan untuk mengolah sumber daya pendidikan secara efektif dan efisien.

Dengan demikian jelaslah bahwa makna pendidikan sebagai sistem adalah seluruh komponen yang ada dalam pendidikan (seperti lingkungan, masyarakat, sumber daya) dapat bekerja sama dalam mencapai tujuan pendidikan nasional, yang dalam implementasinya dapat dilihat dari aspek-aspek sistem yaitu input-proses-output, dan hasil akhir dari output dapat memberikan umpan balik terhadap input dan proses sehingga dapat diketahui hasil akhir tujuan pendidikan.⁵

Pengertian Kebijakan Pendidikan

Kebijakan memiliki arti mengurus masalah atau kepentingan umum atau berarti juga administrasi pemerintah. Istilah kebijakan adalah suatu yang didasari oleh pertimbangan akal dalam proses perbuatannya. Kebijakan juga dipahami sebagai kepandaian, kemahiran, kebijaksanaan, rangkaian konsep dan asas yang menjadi dasar dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak oleh pemerintah, organisasi dan sebagainya sebagai sebuah pernyataan cita-cita, prinsip ataupun maksud dari garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Kemudian pendapat Hogwood dan Gun yang dikutip oleh Nanang Fatah membedakan kebijakan sebagai label untuk bidang kegiatan. Kebijakan sebagai suatu ekspresi umum dari tujuan umum atau keadaan yang diinginkan. Kebijakan merupakan proposal khusus, kebijakan sebagai keputusan pemerintah, kebijakan sebagai otorisasi formal, dan kebijakan sebagai program.⁶

Kebijakan dalam konteks ini adalah kebijakan yang terkait dengan masalah pendidikan. Pendidikan merupakan proses tanpa akhir yang diupayakan oleh siapa pun, terutama negara. Pendidikan sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dan ilmu pengetahuan. Dilihat dari makna sempitnya, pendidikan identik dengan sekolah. Kebijakan pendidikan merupakan suatu yang sifatnya esensial dan komprehensif. Kebijakan yang dibuat ditujukan untuk mengatasi suatu permasalahan yang sifatnya pelik. Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang dibuat berdasarkan aspirasi dan berpihak kepada masyarakat dan realitas yang

⁵ Munirah, "SISTEM PENDIDIKAN DI INDONESIA: antara keinginan dan realita", *Jurnal Auladuna*, Vol.2 No.2, 2015 hal 234-235.

⁶ Farid Setyawan and others, 'Analisis Kebijakan Pendidikan Full Day School Di Indonesia', *Jurnal Pendidikan*, 30.3 (2021), 369 <<https://doi.org/10.32585/jp.v30i3.1632>>.

ada, menyahtui berbagai kepentingan dan meminimalkan adanya kerugian pihakpihak tertentu. Demikian pula halnya dengan kebijakan pendidikan, hendaknya harus mempertimbangkan banyak hal, karena menyangkut kepentingan publik yang dampaknya sangat besar.

Struktur dan Jenis Pendidikan di Indonesia

Jalur pendidikan adalah proses yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri melalui pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan tersebut.

a. Pendidikan Formal

Secara umum pendidikan formal adalah pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah. Jalur pendidikan ini mempunyai sistematis pendidikan yang jelas, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai dengan pendidikan tinggi.

b. Pendidikan Informal

Berdasarkan data Undang-undang No. 20 (2003:72) pendidikan informal adalah jalur pendidikan yang ebrada pada keluarga dan lingkungan. Secara umum pendidikan informal merupakan jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Berbentuk kegiatan belajar secara mandiri yang dilakukan berdasarkan kesadaran dan rasa tanggung jawab. Selain itu, lembaga pendidikan informal adalah pendidikan yang ruang lingkupnya lebih cenderung pada lingkungan keluarga dan masyarakat.

Jenis Pendidikan di Indonesia Jenis pendidikan adalah kelompok suatu kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan di dalam satuan pendidikan.

a. Pendidikan Umum

Pendidikan umum adalah jenis pendidikan dasar dan menengah yang memprioritaskan perluasan pengetahuan yang diperlukan oleh peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Pendidikan ini seperti sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA).

b. Pendidikan Kejuruan Pendidikan kejuruan adalah pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didiknya terutama untuk bekerja dalam

keahlian bidang tertentu. Bentuk satuan pendidikannya adalah sekolah menengah kejuruan (SMK), jenis pendidikan ini memiliki berbagai macam spesialisasi keahlian tertentu yang dapat dipilih oleh setiap peserta didik ketika hendak hendak masuk pada sekolah tersebut.

c. Pendidikan Akademik

Pendidikan akademik adalah jenis pendidikan tinggi dengan program sarjana dan pascasarjana yang berfokus pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu. Sesuai dengan bidang yang dipelajarinya.

d. Pendidikan Profesi

Pendidikan profesi adalah jenis pendidikan tinggi setelah program sarjana untuk mempersiapkan peserta didiknya menjadi spesialis suatu profesi atau menjadi seorang profesional di bidangnya.

e. Pendidikan Keagamaan

Pendidikan keagamaan adalah jenis pendidikan dasar, menengah, dan tinggi dengan tujuan untuk mempersiapkan peserta didiknya agar dapat menjalankan. Peran penguasaan pengetahuan dan pengalaman seputar ajaran agama untuk menjadi ahli ilmu agama.

f. Pendidikan Khusus

Pendidikan khusus adalah jenis pendidikan yang diselenggarakan untuk melayani peserta didik secara khusus atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif (bergabung dengan sekolah biasa). Pendidikan ini berupa satuan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah, dalam bentuk sekolah luar biasa (SLB).⁷

Regulasi Kebijakan Pendidikan di Indonesia dari Pasca Kemerdekaan sampai Pandemi

Kebijakan pendidikan nasional Indonesia sesungguhnya menempati posisi yang sentral bagi usaha memajukan bangsa Indonesia. Apabila pemerintah Indonesia gagal membuat kebijakan yang unggul dalam bidang pendidikan, maka taruhannya adalah kerusakan dan kehancuran kehidupan bangsa Indonesia.

⁷ Abdul Wahab Syakhrani, "Sistem Pendidikan di Indonesia", *ADIBA: JOURNAL OF EDUCATION*, Vol. 2 No. 3, 2022 hal 390-392.

Kebijakan pendidikan yang buruk akan berdampak panjang. Indonesia hanya bisa menjadi bangsa yang unggul jika kebijakan yang dihasilkan adalah kebijakan-kebijakan yang unggul dan tentu saja dapat diimplementasikan.⁸

Dalam sejarah perjalanan pendidikan di Indonesia pasca kemerdekaan sampai pada awal tahun 1950 tujuan pendidikan belum dirumuskan dalam suatu undang-undang yang mengatur pendidikan. Tujuan pendidikan hanya digariskan oleh Kementerian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan dalam bentuk keputusan Menteri, 1 Maret 1946, yaitu warga negara sejati yang menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk negara. Sedangkan dasar pendidikan adalah Pancasila, seperti yang terumuskan dalam UUD 1945. Baru pada tahun 1950 tepatnya pada tanggal 5 April diundangkan undang-undang Nomor 4 tahun 1950 mengenai Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah oleh Presiden Republik Indonesia (Mr. Asaat) dan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.

Kebijakan Sarmidi saat menjadi Menteri Pendidikan Pengajaran tidak hanya meresmikan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1950 akan tetapi Sarmidi juga mengeluarkan Putusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan No. 120/A Tahun 1949 tentang Pemberantasan Buta Huruf (PBH) dan Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 1950 tentang Universitas Gajah Mada yang isinya mengenai “Statuta Universitas Gajah Mada serta masih banyak kebijakan lainnya.”⁹

Adapun kurikulum sekolah pada masa-masa awal kemerdekaan pada tahun 1950-an ditujukan untuk meningkatkan kesadaran bernegara dan bermasyarakat, meningkatkan pendidikan jasmani, meningkatkan pendidikan watak, memberikan perhatian terhadap kesenian, dan lain sebagainya. Menyusul meletusnya peristiwa Gestapu yang gagal, maka melalui TAP MPRS No. XXVII/MPRS/1966 tentang Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan diadakan perubahan dalam rumusan tujuan

⁸ Yudhita Omayra, ‘Dimensions and Strategies To Improve the Quality of Education and Its Impact on the Development of Community Human Resources’, *Jurnal Bina Ummat: Membina Dan Membentengi Ummat*, 4.2 (2021), 77–94 <<https://doi.org/10.38214/jurnalbinaummatstidnatsir.v4i2.114>>.

⁹ Irdhan Epria Darma Putra and others, ‘Perbandingan Kurikulum Pendidikan Indonesia Dan Finlandia’, *Journal on Education*, 06.01 (2023), 7437–48.

pendidikan nasional yaitu “membentuk manusia Pancasila sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan seperti yang dikehendaki oleh pembukaan UUD 1945”.¹⁰

Memasuki orde baru, kebijakan pendidikan di Indonesia pun mengalami berbagai perubahan diantaranya adalah pertama, melanjutkan program pemberantasan buta huruf yang pada tahun 1972 dikembangkan lebih lanjut dengan memberikan keterampilan tertentu; kedua, melaksanakan pendidikan masyarakat agar memiliki kemampuan mental, spiritual, serta keterampilan; ketiga, mengenalkan pendidikan luar sekolah yang berorientasi kepada hal-hal penting yang berkaitan dengan kehidupan sosial, ekonomi dan budaya sebagai kebutuhan praktis; keempat, mengenalkan kegiatan inovasi pendidikan, misalnya Kuliah Kerja Nyata (KKN), dibukanya sekolah dan universitas terbuka, wajib belajar, dan sebagainya; kelima, pembinaan generasi muda melalui Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), Organisasi Mahasiswa Kampus, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), atau organisasi kepemudaan lainnya; keenam, dilaksanakannya program orang tua asuh mulai tahun 1984.

Sistem sentralistik menjadi kebijakan pendidikan utama dalam Pemerintahan Orde Baru. Politik pendidikan yang bersifat sentralistik akan memudahkan pemerintah untuk memonitor dan mengontrol jalannya penyelenggaraan pendidikan. Karena pemerintahan orde baru menyadari bahwa pendidikan adalah sarana yang paling strategis dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang. Agar pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan mengarah pada sasaran dan tujuan menurut pemerintah, maka segala perencanaan pendidikan harus ditentukan dan dikontrol oleh pusat.¹¹

Sebagai sebuah kesimpulan bahwa Kebijakan pendidikan pada masa orde baru diarahkan pada penyeragaman. Pada masa ini tidak ada tempat bagi perbedaan pendapat, sehingga melahirkan disiplin semu dan melahirkan masyarakat peniru. Pada masa ini pertumbuhan ekonomi yang dijadikan panglima.

¹⁰ Mouliza, ‘Analisis Perbandingan Kebijakan Pendidikan Dasar Antara Indonesia Dan Thailand Tahun 2009-2013’, 2013, 1–26.

¹¹ Nola Nari, Yulia Akmay, and Dewi Sasmita, ‘Penerapan Permainan Puzzle Untuk Meningkatkan Kemampuan Membilang’, *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi*, 7.1 (2020), 44–52 <<https://doi.org/10.21831/jppfa.v7i1.26499>>.

Relevansi pendidikan diperhatikan dengan penyesuaian isi pendidikan dengan kebutuhan pembangunan terhadap sumber daya manusia yang diperlukan. Kebijakan ini secara eksplisit muncul pada pelita I, II, III, IV dan V.

Era reformasi memberi ruang yang cukup besar bagi perumusan kebijakan pendidikan baru yang bersifat reformatif dan revolusioner. Pendidikan di era reformasi 1999 mengubah wajah sistem pendidikan Indonesia melalui UU No 22 tahun 1999, dengan ini pendidikan menjadi sektor pembangunan yang didesentralisasikan. Pemerintah memperkenalkan model “Manajemen Berbasis Sekolah”. Sementara untuk mengimbangi kebutuhan akan sumber daya manusia yang berkualitas, maka dibuat sistem “Kurikulum Berbasis Kompetensi”.

Memasuki tahun 2003 pemerintah membuat UU No.20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menggantikan UU No 2 tahun 1989, dan sejak saat itu pendidikan dipahami sebagai, “Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.

Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen pasal 2 ayat (1) guru sebagai tenaga profesional mengandung arti bahwa pekerjaan guru hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik sesuai dengan persyaratan untuk setiap jenis dan jenjang pendidikan tertentu. Pasal (4) Yang dimaksud dengan guru sebagai agen pembelajaran (learning agent) adalah peran guru antara lain sebagai fasilitator, motivator, pemacu, perekayasa pembelajaran, dan pemberi inspirasi belajar bagi peserta didik.

Masa pandemi merupakan kondisi dimana kejadian wabah penyakit sudah menyebar secara global. Menurut WHO (World Health Organisation) sesuatu itu dikatakan pandemi manakala terjadinya penyakit sudah menyebar keseluruh dunia melampaui batas. Penyebaran virus corona yang sangat massif telah mengakibatkan aktivitas manusia menjadi serba di rumahkan. Bertatap muka langsung dalam setiap kegiatan pembelajaran menjadi pembelajaran yang

dilaksanakan di rumah (BDR) karena untuk menghindari paparan penularan virus yang semakin massif dari waktu ke waktu. Proses kegiatan belajar mengajar harus tetap berjalan dan peserta didik jangan kehilangan haknya dalam belajar.¹²

Sekolah sebagai lembaga penyelenggara pendidikan harus cepat tanggap terhadap fenomena wabah covid 19 dengan senantiasa berupaya agar proses pembelajaran dapat terlaksana secara efektif. Pemerintah dalam hal ini menteri pendidikan telah menetapkan kebijakan pendidikan di tengah pandemi dengan mengeluarkan surat edaran Nomor 15 tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah (BDR) dalam masa darurat penyebaran Corona Virus Disease (Covid 19). Dalam rangka pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan selama darurat penyebaran virus corona, maka penyelenggaran pendidikan dilakukan melalui program pembelajaran jarak jauh (PJJ). Metode pembelajaran yang dikembangkan selama proses pembelajaran jarak jauh dapat dilakukan dengan menggunakan metode pembelajaran daring dan luring.

Reformasi Pendidikan di Singapura

Berbeda dengan negara-negara lain di Asia yang memiliki sejarah panjang, Singapura adalah negara muda yang baru memperoleh kemerdekaan pada tanggal 9 Agustus 1965. Pada tahun 1819, The British East India Company, perusahaan dagang Inggris yang berpengalaman melalang buana memutuskan untuk membangun pelabuhan dagang diujung Malaysia yang saat itu masih berupa daerah rawa rawa yang belum berkembang. Sir Thomas Stamford Raffles, seorang visioner berkebangsaan, memimpin upaya pendudukan di daerah tersebut sehingga pada tahun 1825 Singapura menjelma sebagai sebuah pelabuhan yang sibuk. Selama lebih dari seratus tahun kemudian, Singapura menjadi koloni Inggris dan terus berkembang.

Namun, perkembangan tersebut harus terhenti dengan pecahnya Perang Dunia II ketika Jepang menginvasi pada tahun 1942. Singapura yang dianggap sebagai benteng yang tak tertembus di area Pasific jatuh ke tangan Jepang hanya

¹² Dea Mustika and others, 'Kajian Perbandingan Kebijakan Pendidikan Dasar Di Indonesia Dan Amerika Serika', *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4.3 (2022), 4356–62 <<https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i3.2799>>.

dalam hitungan hari. Selanjutnya Singapura diduduki Jepang selama tiga setengah tahun. Orang-orang Inggris dan Eropa yang saat itu tinggal di Singapura dipenjarakan sedangkan penduduk asli harus menderita bahkan mengalami siksaan yang berakhir pada kematian.¹³

Ketika tentara Jepang mundur pada akhir perang dunia II, penduduk asli Singapura memulai pergerakan kemerdekaannya dan pada 1959 Inggris melepaskan kekuasaannya atas Singapura. Dengan demikian sejarah baru sebagai entitas yang merdeka dimulai. Awalnya, Singapura masih bergabung dengan Malaysia karena ketergantungannya pada pangan, air dan sumber daya alam.

Namun, usaha untuk menggabungkan Singapura sebagai bagian dari negara Malaysia tidak membuahkan hasil karena Singapura sebenarnya adalah kota China dimana 70% penduduk Singapura adalah warga keturunan China, 15% warga keturunan India, dan 10% adalah warga keturunan Melayu.¹⁴ Akhirnya pada tahun 1965 Singapura benar-benar berpisah dari Malaysia dan pada tahun inilah sejarah Singapura sebagai sebuah Negara dimulai. Pada saat itu, Negara yang baru lahir ini belum memiliki sistem persekolahan, sistem konstitusi, tentara, angkatan laut maupun sumberdaya alam yang memadai. Kekuatan utama negara ini bersandar pada tiga hal yaitu posisi strategis di jalur laut tersibuk, kepemilikan pelabuhan laut terbesar, dan sumber daya manusia. Dari tiga modal inilah Singapura membangun sebuah negara.¹⁵

Perbandingan Kebijakan Pendidikan Indonesia Dan Singapura

Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong menyerukan kepada Orang tua untuk mendukung perubahan pada system Pendidikan. Lee menyampaikan bahwa Pendidikan atau sekolah di Singapura tidak hanya memberikan keterampilan dalam mencari nafkah, namun juga Pendidikan diarahkan untuk mengembangkan karakter dan Nilai-nilai yang tidak terlihat namun penting, perdana menteri Singapura juga mengatakan untuk mengurangi penekanan

¹³ Syakrani and others.

¹⁴ Armansyah Putra, 'Mengkaji Dan Membandingkan Kurikulum 7 Negara (Malaysia, Singapura, Cina, Korea, Jepang, Amerika Dan Finlandia)', *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 2017, 1-21.

¹⁵ Muhandi, 'Kontribusi Pendidikan Dalam Meningkatkan Kualitas Bangsa Indonesia', *Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 20.4 (2004), 478-92.

pada hasil akademik dan mendedikasikan waktu kurikulum untuk pembelajaran yang lebih dalam, dan membantu siswa menemukan hubungan antara isi buku teks dan dunia nyata.

Dengan cara ini, Pendidikan Dasar Singapura mendorong siswa untuk menemukan bakat dan minat untuk mencapai potensi maksimal mereka, serta meningkatkan minat agar selalu belajar sepanjang hayat. Berharap jika mereka lulus, siswa dapat mempertahankan etika dan akhlaq serta mengembangkan budaya luhur. tetapi mereka harus mengerti dan menghormati perbedaan dan bertanggung jawab atas pribadi, lingkungan masyarakat serta Negara mereka. Menetapkan kebijakan bahwa semua warga negara harus belajar selama sepuluh tahun, anak berumur enam tahun wajib belajar, dan wali siswa dapat terkena denda jika anaknya tidak sekolah.

Kementerian Pendidikan Negara Singapura mendukung sekolah untuk memanfaatkan teknologi. Dengan menggunakan teknologi peserta didik dapat mengerti dan memahami mata pelajaran lebih mudah. Pendidik bisa memanfaatkan teknologi untuk dapat menggunakan teknologi untuk memberikan pendidikan yang lebih Efektif dan efisien. Pendidik bisa menyiapkan apa yang akan diajarkan sebelumnya. Seperti, peserta didik sekolah dasar Shuqun memiliki teknologi terkait (data logger (data logger), PDA (mobile information terminal-PDA), tablet PC (tab), mind map, podcast (rekaman data). Dan penyimpanan). Serta Melengkapi bermacam model pembelajaran (mengumpulkan data, mengumpulkan informasi, inovasi pengetahuan, presentasi, dll.) serta jalur pembelajaran pengalaman untuk memungkinkan pelajar belajar lebih efektif.¹⁶

Menurut hasil pendidikan pada negara Singapura, Singapura menganggap seorang yg telah berpendidikan dia akan tanggung jawab pada diri sendiri, serta keluarga dan teman-temannya. Orang-orang terpelajar juga bertanggung jawab atas komunitas dan negaranya. Jadi, dari upaya pendidikan di Singapura, ada satu karakter yang menonjol. Oleh karena itu, sebagai hasil pendidikan di Singapura, siswa belajar membedakan mana yang benar dan mana yang salah, berbagi dan

¹⁶ Armansyah Putra, 'Mengkaji Dan Membandingkan Kurikulum 7 Negara (Malaysia, Singapura, Cina, Korea, Jepang, Amerika Dan Finlandia)', *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 2017, 1–21.

mengutamakan orang lain, menjalin persahabatan dengan orang lain, tertarik pada hal-hal baru, dan melakukannya. dan mengungkapkan. Opini, mereka yakin/bangga dengan pekerjaannya, bisa menjaga pola hidup sehat dan mencintai Singapura.¹⁷

Menurut data terakhir ada sekitar 20 ribu pelajar Indonesia yang belajar di Singapura dari berbagai jenjang pendidikan mulai dari SD hingga pendidikan tinggi. Untuk jumlah mahasiswa Indonesia yang belajar di Singapura bisa dikatakan mencapai angka empat ribu mahasiswa yang tersebar di berbagai macam perguruan tinggi di Singapura. Tidak sedikit dari mahasiswa yang melanjutkan studi di Singapura berasal dari sekolah yang telah bermitra melalui kerjasama Sister School yang kemudian mendapatkan beasiswa ataupun melanjutkan dengan biaya sendiri. Untuk melanjutkan studi di Singapura, pemerintah Singapura banyak menawarkan beasiswa dan juga pembiayaan melalui skema Tuition Grant atau skema pemerintah yang mensubsidi 70% dari biaya sekolah. Dan sebagai gantinya, siswa diwajibkan melakukan ikatan kerja selama tiga tahun di Singapura. Biaya yang relatif murah ini tidak berarti kualitas dan pengalaman yang ditawarkan lebih buruk dibandingkan negara lain.

Selain itu, terbukanya lapangan kerja baru bagi masing-masing warga negara untuk mendapatkan penghasilan dari pengunjung asing. Dengan begitu, untuk Indonesia sendiri, jika tenaga kerjanya sudah mampu untuk bersaing di dunia internasional maka akan dapat menjawab berbagai tantangan globalisasi. Dengan dimilikinya tenaga kerja berkualitas, tentunya akan membawa dampak positif tersendiri bagi Indonesia. Indonesia mampu memperbaiki kualitas ekonomi, sehingga mampu masuk jajaran raksasa ekonomi dunia.¹⁸

Secara umum kebijakan sistem pendidikan di Indonesia dan Singapura dapat dijelaskan melalui tabel di bawah ini :

No.	Aspek	Sistem pendidikan di Indonesia	Sistem pendidikan di Singapura
-----	-------	--------------------------------	--------------------------------

¹⁷ Ibid

¹⁸ Syakrani, Abdul Wahab, Abd Malik, Hasbullah, Muhammad Budi, and Muhammad Maulidan, 'Sistem Pendidikan Di Negara Singapura', *Adiba: Journal of Education*, 2.4 (2022), 517–27

1	Dasar	UUD 1945 Dan Pancasila	Pemikiran bahwa setiap siswa memiliki bakat dan
2	Tujuan	Meningkatkan ketaqwaan, kecerdasan, keterampilan dan budipekerti luhur, rasa cinta tanah air (patriotisme), memupuk sikap membangun diri sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab	Membentuk masyarakat Singapura yang berbudaya tinggi dalam hal etika, disiplin dan prilaku sosial sehari-hari, serta mengembangkan kreatifitas
3	Fungsi	Mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan	-
4	Jenjang	PAUD TK SD/MI SMP/MTs	TK SD SMP SMA
5	Isi	Pendidikan Pancasila Pendidikan Agama Pendidikan Kewarganegaraan Bahasa Indonesia Membaca dan menulis Matematika (termasuk berhitung) Pengantar SAINS dan Teknologi Ilmu bumi Sejarah nasional dan sejarah umum	Bahasa Inggris Matematika IPA IPS Seni Mother tongue language
6	Faktor-faktor yang mempengaruhi Pendidikan	Faktor Tujuan Faktor Pendidik Faktor peserta didik Faktor Alat Faktor lingkungan Masyarakat Efektifitas Pendidikan di Indonesia	Fasilitas yang memadai Faktor biaya Faktor pendidik Faktor Anggaran Pendidikan Analisis Kurikulum

KESIMPULAN

Negara Indonesia memang masih tertinggal dengan negara Singapura di bidang pendidikan. Terbukti dari perbedaan jenjang-jenjang pendidikan antara Indonesia dan Singapura yaitu, perbedaan yang cukup jauh dalam jenjang pendidikan dasar negara Singapura hanya 6 tahun sedangkan negara Indonesia membutuhkan waktu 9 tahun dngan rincian 6 tahun SD dan 3 tahun SMP, perbedaan berikutnya dalam jenjang pendidikan menengah negara Singapura membutuhkan waktu 4 sampai 5 tahun dalam jenjang ini, sementara negara Indonesia membutuhkan waktu 3 tahun tetapi negara Singapura pada jenjang ini mengklasifikasikan kemampuan siswa menjadi Express, Normal Academic dan Normal Technical, sedangkan Indonesia hanya menggunakan program akselerasi pada sekolah-sekolah tertentu. Jadi penyelesaian dijenjang menengah di negara Singapura membutuhkan waktu 11 tahun sedangkan negara Indonesia lebih lama 1 tahun yaitu 12 tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab Syakhrani, “Sistem Pendidikan di Indonesia”, *ADIBA: JOURNAL OF EDUCATION*, Vol. 2 No. 3, 2022 hal 390-392.
- Mouliza, ‘Analisis Perbandingan Kebijakan Pendidikan Dasar Antara Indonesia Dan Thailand Tahun 2009-2013’, 2013, 1–26
- Muhardi, ‘Kontribusi Pendidikan Dalam Meningkatkan Kualitas Bangsa Indonesia’, *Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 20.4 (2004), 478–92
- Mustika, Dea, Alchonity Harika Fitri, Azwar Ananda, Rusdinal Rusdinal, and Nurhizrah Gistituati, ‘Kajian Perbandingan Kebijakan Pendidikan Dasar Di Indonesia Dan Amerika Serika’, *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4.3 (2022), 4356–62 <<https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i3.2799>>
- Munirah, “SISTEM PENDIDIKAN DI INDONESIA: antara keinginan dan realita”, *Jurnal Auladuna*, Vol.2 No.2, 2015 hal 234-235.
- Nari, Nola, Yulia Akmay, and Dewi Sasmita, ‘Penerapan Permainan Puzzle Untuk Meningkatkan Kemampuan Membilang’, *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi*, 7.1 (2020), 44–52 <<https://doi.org/10.21831/jppfa.v7i1.26499>>
- Omayra, Yudhita, ‘Dimensions and Strategies To Improve the Quality of Education and Its Impact on the Development of Community Human Resources’, *Jurnal Bina Ummat: Membina Dan Membentengi Ummat*, 4.2 (2021), 77–94 <<https://doi.org/10.38214/jurnalbinaummatstidnatsir.v4i2.114>>
- Pepen Supandi, “Variasi (Format) Sistem Pendidikan di Indonesia”, *Jurnal Almufida* Vol. I No. 1 2016
- Putra, Armansyah, ‘Mengkaji Dan Membandingkan Kurikulum 7 Negara (Malaysia, Singapura, Cina, Korea, Jepang, Amerika Dan Finlandia)’, *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 2017, 1–21
- Putra, Irdhan Epria Darma, Rusdinal Rusdinal, Azwar Ananda, and Nurhizrah Gistituati, ‘Perbandingan Kurikulum Pendidikan Indonesia Dan Finlandia’, *Journal on Education*, 06.01 (2023), 7437–48
- Setyawan, Farid, Ismail Fauzi, Bunga Fatwa, Hilmi Abdussalam Zaini, and Nur

Mrs Jannah, 'Analisis Kebijakan Pendidikan Full Day School Di Indonesia', *Jurnal Pendidikan*, 30.3 (2021), 369
<<https://doi.org/10.32585/jp.v30i3.1632>>

Sitompul, Martahi Saoloan, 'Dampak Kerjasama Pendidikan Indonesia Dan Singapura (Studi Kasus: : Sister School SMA Labschool Jakarta Dan Chij St. Joseph's Convent Singapura 2008-2011)', *Jom Fisip*, 5.2 (2018), 1-12

Syakrani, Abdul Wahab, Abd Malik, Hasbullah, Muhammad Budi, and Muhammad Maulidan, 'Sistem Pendidikan Di Negara Singapura', *Adiba: Journal of Education*, 2.4 (2022), 517-27
<<http://www.ef.co.id/upa/education-systems/education-system-singapore>>